

BAB II

GAMBARAN UMUM EKOWISATA PEKALONGAN MANGROVE PARK

2.1 Gambaran Umum Kota Pekalongan

Kota Pekalongan merupakan wilayah perkotaan di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki posisi geografis penting karena dilalui oleh jalur utama Pantai Utara (Pantura) yang menghubungkan Jakarta dan Surabaya, serta memiliki akses yang relatif dekat dengan jalur selatan Pulau Jawa. Secara administratif, Kota Pekalongan berada di antara Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah, Kota Pekalongan ditetapkan sebagai pusat simpul pengembangan kawasan Petanglong yang mencakup Kota Pekalongan, Kabupaten Batang, dan Kabupaten Pekalongan yang merupakan kawasan strategis yang berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan sektor unggulan daerah. Sementara itu, dalam Rencana Tata Ruang Kegiatan Nasional (RTRWN), Kota Pekalongan juga ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) sehingga diharapkan mampu menjadi motor penggerak pembangunan bagi wilayah disekitarnya.

Secara geografis, Kota Pekalongan berada pada posisi $6^{\circ} 50' 42''$ - $6^{\circ} 55' 44''$ Lintang Selatan dan $109^{\circ} 37' 55''$ - $109^{\circ} 42' 19''$ Bujur Timur. Selain itu, Kota Pekalongan memiliki koordinat fiktif pada rentang 510.00 - 518.00 km arah bujur dan 517.75 - 526.75 arah lintang. Wilayah administrasi Kota Pekalongan terdiri atas empat kecamatan dengan luas total sekitar 4.525 atau 45,25 km² dengan jarak terjauh dari Utara ke Selatan mencapai ± 9 km, sedangkan dari Barat ke Timur mencapai ± 7 km. Kecamatan paling luas adalah Pekalongan Utara yaitu 1.488 Ha

dan kecamatan paling kecil adalah Pekalongan Timur yaitu 952 Ha. Kondisi topografi Kota Pekalongan didominasi oleh wilayah yang relatif datar tanpa kemiringan yang tajam, dengan komposisi lahan berupa 74,32% tanah kering dan 25,68% tanah sawah. Kota Pekalongan beriklim tropis yang ditandai dengan dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Suhu udara rata - rata di Kota Pekalongan cenderung stabil setiap tahunnya, berkisar antara 23 - 35°C.

2.1.1 Kondisi Demografis Kota Pekalongan

Kondisi demografis Kota Pekalongan berdasarkan data BPS, menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada tahun 2024 tercatat sebanyak 321.095 jiwa, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang berjumlah 311.349 jiwa. Penduduk tersebut terdiri atas 97.994 jiwa di Kecamatan Pekalongan Barat, 70.728 jiwa di Kecamatan Pekalongan Timur, 71.429 jiwa di Kecamatan Pekalongan Selatan, dan 80.944 jiwa di Kecamatan Pekalongan Utara. Laju pertumbuhan penduduk rata - rata mencapai 1,19% per tahun, dengan laju tertinggi di Kecamatan Pekalongan Selatan sebesar 2,18%. Dari segi distribusi, persentase penduduk terbesar berada di Kecamatan Pekalongan Barat yaitu 30,52%, sedangkan yang terkecil di Pekalongan Timur yaitu 22,03%. Kepadatan penduduk Kota Pekalongan pada tahun 2024 mencapai 7.096 jiwa per km², dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Pekalongan Barat sebesar 9.751 jiwa per km² dan terendah di Pekalongan Utara sebesar 5.440 jiwa per km². Rasio jenis kelamin pada tingkat kota mencapai 102, menunjukkan bahwa jumlah laki - laki sedikit lebih banyak dibanding perempuan, dengan variasi antar kecamatan berkisar antara 101,4 hingga 103,2. Jika dibandingkan dengan data tahun 2023, terlihat adanya peningkatan jumlah penduduk sekitar 9.746 jiwa serta

kenaikan kepadatan penduduk, yang semakin menegaskan karakter Kota Pekalongan sebagai wilayah dengan kepadatan tinggi. Selain itu, struktur usia masih didominasi penduduk usia produktif yang melebihi 70%, menunjukkan potensi bonus demografi, sementara indikator kualitas penduduk pada tahun 2023 tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 76,72, rata - rata lama sekolah 9,5 tahun, harapan lama sekolah 13 tahun, serta angka harapan hidup 74,59 tahun.

2.1.2 Kondisi Pariwisata Kota Pekalongan

Kota Pekalongan dikenal sebagai salah satu kota pesisir di Jawa Tengah yang memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan potensi ekonomi yang beragam sehingga memiliki keunggulan pada potensi wisatanya. Sebagai kota yang dijuluki “*World’s City of Batik*” oleh UNESCO, Kota Pekalongan tidak hanya menawarkan warisan batik, tetapi juga menyimpan daya tarik wisata lain yang mencerminkan perpaduan antara budaya lokal dan keindahan alam. Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Pemerintah Kota Pekalongan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kota Pekalongan Tahun 2013 - 2028 sebagai pedoman pembangunan pariwisata daerah. Perda ini memuat visi untuk menjadikan Kota Pekalongan sebagai destinasi pariwisata utama dengan strategi pengembangan destinasi wisata, pemasaran, industri, kelembagaan pariwisata yang berkelanjutan, menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat, serta pelestarian budaya dan lingkungan. Arah kebijakan tersebut juga diperkuat melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata yang menegaskan bahwa pengembangan

pariwisata dilakukan berdasarkan asas manfaat, kelestarian, partisipatif, dan berkelanjutan. Dengan adanya landasan hukum tersebut, pengelolaan sektor pariwisata di Kota Pekalongan memiliki arah yang jelas dan terintegrasi. Ragam destinasi di Kota Pekalongan mencakup wisata buatan yaitu, Museum Batik dan Wisata Bahari Pekalongan serta wisata alam yaitu, Pantai Pasir Kencana, Pantai Slamaran Indah, dan Pekalongan Mangrove Park.

Gambar 2.1 Museum Batik Kota Pekalongan



Sumber: Wikipedia, 2025.

Museum Batik Pekalongan diresmikan pada 12 Juli 2006 oleh Presiden RI, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono yang berlokasi di Jalan Jetayu Nomor 1. Museum ini menempati bangunan bersejarah peninggalan kolonial Belanda yang didirikan pada pertengahan abad ke - 19. Museum Batik Pekalongan menampilkan beragam koleksi batik dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara yang dipamerkan dalam tiga ruang koleksi. Museum ini memperoleh penghargaan dari UNESCO sebagai *Best Practice in Batik Conversation*. Selain menonton koleksi, penunjung dapat memperdalam pengetahuan melalui buku, film dokumenter, dan berkesempatan mencoba membuat batik secara langsung (Harywibowo, 2024: 293).

Gambar 2.2 Wisata Bahari Pekalongan



Sumber: Visit Jawa Tengah, 2025.

Wisata Bahari terletak di wilayah pesisir Kota Pekalongan, tepatnya di Jalan WR Supratman Nomor 1 yang berada dalam kawasan Kompleks Pelabuhan Perikanan Nusantara Pekalongan. Kawasan wisata ini menawarkan panorama alam yang mencakup pantai, laut, dan muara sungai Pekalongan. Pengunjung dapat menikmati berbagai aktivitas, antara lain berkeliling menggunakan perahu, menyaksikan koleksi ikan laut di akuarium, memancing, hingga bersantai dan menghabiskan waktu di area taman bermain yang telah disediakan.

Gambar 2.3 Pantai Pasir Kencana

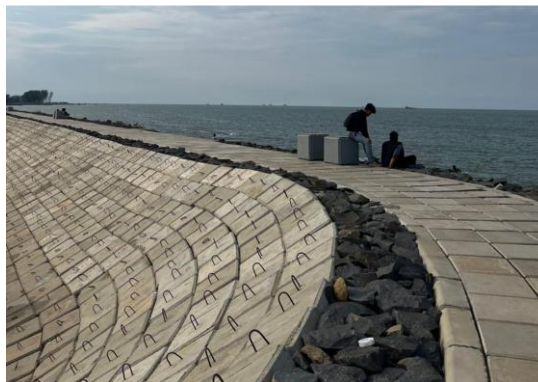


Sumber: Visit Jawa Tengah, 2023.

Pantai Pasir Kencana terletak di Kelurahan Panjang Wetan, Kota Pekalongan dan berjarak sekitar 4,5 km dari pusat kota. Pantai Pasir Kencana

berada di kawasan pelabuhan pendaratan ikan yang memiliki taman wisata laut (TWL) dengan berbagai wahana seperti, kolam renang anak dan dewasa, *skywalk* untuk jogging, panggung keong untuk pertunjukan seni, tower batik sebagai menara pandang, perahu bebek, dan skuter. Harga tiket masuk Pantai Pasir Kencana sebesar Rp 15.000,00 per orang pada hari biasa dan Rp 20.000,00 per orang pada akhir pekan maupun hari libur nasional.

Gambar 2.4 Pantai Slamaran



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024.

Pantai Slamaran berlokasi di Jalan Pantai Dewi yang letaknya hanya sekitar 5 km dari pusat Kota Pekalongan dengan luas area sekitar 3,5 Ha. Pantai ini masih terjaga kealamiannya dan kerap dimanfaatkan warga sekitar sebagai lokasi penangkapan ikan. Dengan ukuran pantai yang relatif kecil, pantai ini menawarkan harga tiket masuk yang terjangkau, yakni Rp3.000,00 per orang pada hari biasa dan Rp5.000,00 per orang pada akhir pekan maupun hari libur nasional.

Gambar 2.5 Pekalongan Mangrove Park



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2024.

Pekalongan Mangrove Park (PMP) berlokasi di Kelurahan Kandang Panjang, Pekalongan Utara dengan luas 88 Ha. PMP diresmikan pada tahun 2013, PMP menawarkan keindahan hutan mangrove dengan fasilitas edukatif seperti galeri ekosistem, area pembibitan, serta Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM) sehingga berperan sebagai ruang rekreasi sekaligus sarana pembelajaran lingkungan.

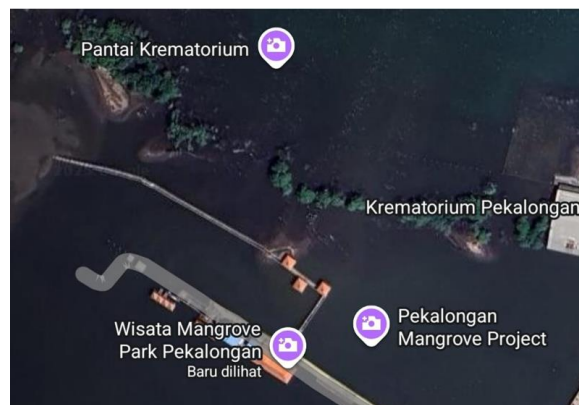
Pengelolaan pariwisata di Kota Pekalongan tidak hanya menitikberatkan pada pengembangan destinasi wisata semata, tetapi juga didukung regulasi yang menekankan kelestarian budaya dan lingkungan. Sinergi antara potensi wisata yang beragam dan kebijakan pemerintah ini menjadi fondasi penting bagi Kota Pekalongan untuk tumbuh sebagai kota wisata yang berdaya saing, berkelanjutan, serta memperkuat posisinya sebagai kota wisata pesisir dan pusat batik dunia.

2.2 Profil Umum Pekalongan Mangrove Park

2.2.1 Lokasi Pekalongan Mangrove Park

Secara administratif, Pekalongan Mangrove Park berada di Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Destinasi ini berjarak sekitar 4,5 km dari pusat Kota Pekalongan dan dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 10 menit perjalanan. Akses jalan ke destinasi wisata ini sangat memadai dan dapat dilalui oleh kendaraan roda empat.

Gambar 2.6 Lokasi Pekalongan Mangrove Park



Sumber: Diolah Peneliti dari *Google Maps*, 2025.

2.2.2 Sejarah Pekalongan Mangrove Park

Pekalongan Mangrove Park (PMP) berawal dari masalah serius abrasi pantai di wilayah pesisir Kota Pekalongan. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, abrasi semakin parah hingga air laut masuk ke pemukiman warga. Untuk menanggulangnya, Pemerintah Kota Pekalongan menetapkan 88 hektar kawasan mangrove sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pekalongan tahun 2009 - 2029. Sebagai tindak lanjut, pada akhir tahun 2013 Menteri Kehutanan

Zulkifli Hasan meresmikan Pekalongan Mangrove Park yang berlokasi di Kelurahan Kandang Panjang, Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Destinasi ini dirancang tidak semata - mata sebagai objek wisata, melainkan juga berfungsi sebagai edukasi serta upaya pelestarian lingkungan. Pada tahun 2013 - 2018, PMP dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan, dan Pokmas Muara Rezeki.

Seiring perkembangan, sejak tahun 2018 pengelolaan PMP dibagi ke tiga Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kota Pekalongan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Seiring waktu, PMP menghadapi berbagai permasalahan seperti abrasi yang terus berlangsung hingga merusak sebagian mangrove, jembatan kayu, gazebo, banyaknya fasilitas yang terbengkalai seperti gedung Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM), galeri ekosistem mangrove, dan kolam sentuh. Kondisi tersebut menjadikan PMP mengalami penurunan fungsi destinasi ekowisata unggulan sebagai sarana rekreasi serta pusat edukasi dan pelestarian lingkungan pesisir Kota Pekalongan.

2.2.3 Harga Tiket Masuk Wisata

Harga tiket masuk Pekalongan Mangrove Park (PMP) telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan regulasi tersebut, setiap pengunjung dikenakan tarif masuk sebesar Rp 4.000,00 per orang pada hari biasa, Rp 5.000,00 per orang pada

hari libur, dan Rp 10.000,00 per orang pada hari tertentu. Selain itu, terdapat ketentuan biaya parkir yang disesuaikan dengan jenis kendaraan, yaitu Rp 2.000,00 untuk sepeda motor, Rp 5.000,00 untuk mobil, Rp 20.000,00 untuk bus, truk, dan kereta wisata, serta Rp 1.000,00 untuk becak. Penerapan tarif ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam mengelola retribusi daerah sekaligus mendukung keberlanjutan pengelolaan PMP sebagai destinasi ekowisata yang memiliki fungsi rekreasi dan edukasi.

Gambar 2.7 Tiket Masuk Pekalongan Mangrove Park



Sumber: Dokumentasi Peneliti, 2025.

2.2.4 Data Kunjungan dan Pendapatan Pekalongan Mangrove Park

Sebagai salah satu destinasi wisata yang mengusung konsep ekowisata di Kota Pekalongan, wisata Pekalongan Mangrove Park (PMP) menunjukkan peningkatan daya tarik bagi wisatawan dari tahun ke tahun. Jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke PMP secara langsung berpengaruh terhadap pendapatan daerah melalui kontribusi tiket masuk. Data kunjungan dan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Data Kunjungan dan Pendapatan Pekalongan Mangrove Park

Tahun	Jumlah Wisatawan	Pendapatan
2020	1815	Rp 6.441.750
2021	1423	Rp 5.504.750
2022	3187	Rp 14.885.500
2023	4616	Rp 20.826.000
Total	11041	Rp 47.658.000

Sumber: Buku Statistik Pariwisata Jawa Tengah, 2020-2023. (Diolah Peneliti)

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020, kunjungan wisatawan pada PMP terdapat 1815 dengan PAD sebesar Rp 6.441.750,00. Pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah wisatawan menjadi 1423 dengan PAD Rp 5.504.750,00 akibat dampak pandemi *Covid-19*. Namun, pada tahun 2022 terjadi lonjakan wisatawan hampir dua kali lipat menjadi 3187 wisatawan dengan PAD Rp 14.885.500,00. Lalu, pada tahun 2023 terdapat kenaikan kunjungan wisatawan menjadi 4616 dengan PAD Rp. 20.826.000,00. Data tersebut menunjukkan bahwa Pekalongan Mangrove Park (PMP) tidak hanya berfungsi sebagai destinasi ekowisata berbasis edukasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah Kota Pekalongan. Dengan demikian, keberadaan PMP memiliki peran strategis baik dari sisi lingkungan maupun ekonomi daerah.

2.3 *Stakeholder* dalam Pengelolaan Pekalongan Mangrove Park

2.3.1 Pemerintah

Pengelolaan Pekalongan Mangrove Park melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mendorong terciptanya ekowisata yang berkelanjutan dan berbasis edukasi lingkungan. Salah satu aktor utama adalah pemerintah yang terdiri dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Peran pemerintah dalam pengelolaan Pekalongan Mangrove Park (PMP) sangat krusial karena menjadi aktor utama dalam penyusunan kebijakan, pengawasan, dan fasilitasi berbagai kegiatan yang berlangsung di kawasan ekowisata tersebut. Pemerintah berperan strategis sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pengawas agar pengelolaan PMP dapat berjalan sesuai prinsip keberlanjutan lingkungan dan edukasi publik. Peran pemerintah dijalankan melalui beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) meliputi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Pekalongan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan, serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan. Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga Kota Pekalongan berperan dalam mengelola aspek pariwisata, termasuk pengembangan fasilitas wisata, infrastruktur, promosi, mengelola retribusi dan pendapatan daerah dari kunjungan wisatawan sesuai Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan berperan meningkatkan daya saing wisata melalui inovasi program wisata edukatif berbasis lingkungan. Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pekalongan berperan pada pengelolaan aset gedung Pusat Restorasi dan Pembelajaran Mangrove (PRPM)

sebagai pusat edukasi dan konservasi mangrove serta pengembangan budidaya rumput laut dan perikanan. Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan berperan dalam menjaga ekosistem melalui pembibitan, penanaman, dan pelestarian mangrove di sekitar kawasan PMP dan melakukan pengawasan kualitas lingkungan pesisir. Dengan adanya pembagian tugas tersebut, pemerintah berupaya memastikan pengembangan Pekalongan Mangrove Park berjalan sejalan dengan tujuan ekowisata, yakni pelestarian lingkungan, edukasi, dan peningkatan daya tarik wisata Kota Pekalongan.

2.3.2 Lembaga Swadaya Masyarakat

Dalam pengelolaan Pekalongan Mangrove Park, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) hadir sebagai mitra strategis pemerintah dengan memberikan kontribusi penting dalam aspek konservasi lingkungan dan pemberdayaan masyarakat. Keberadaan LSM memperkuat upaya pelestarian ekosistem mangrove sekaligus mendorong partisipasi aktif masyarakat pesisir agar berdaya secara sosial dan ekonomi tanpa mengabaikan aspek ekologis. LSM yang terlibat dan berperan penting dalam pengelolaan Pekalongan Mangrove Park yaitu, Kemitraan Indonesia. Kemitraan Indonesia mendorong program pembangunan *breakwater* untuk mengurangi abrasi. Peran LSM melengkapi fungsi pemerintah dengan menghadirkan dukungan teknis, pendanaan, serta pemberdayaan masyarakat agar pengelolaan ekowisata lebih berkelanjutan. LSM hadir pada pengelolaan Pekalongan Mangrove Park tidak semata-mata diarahkan pada pengembangan sektor pariwisata, tetapi juga menitikberatkan pada pelestarian lingkungan,

penguatan kegiatan konservasi, serta peningkatan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnya menjaga ekosistem mangrove.